

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 yang telah tersusun, harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sebagai unsur perangkat daerah yang bertugas mendukung tugas kepala daerah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja, melakukan perubahan kearah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan Renstra SKPD, Penyusunan rancangan Renstra SKPD,
- Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, dan penetapan Renstra SKPD.

Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-

2025 (Perda No. 4 Tahun 2013) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa "Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD". Selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra merupakan komitmen setiap SKPD dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar didasari dengan landasan hukum :

1.2.1. UNDANG - UNDANG

- Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1137) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587, tembusan lembaran Negara RI Nomor)
- Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1.2.2. PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksana SKPD

1.2.3. PERATURAN PRESIDEN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial.

1.2.4. PERATURAN MENTERI

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan RENSTRA SKPD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 52 Tahun 2015 tentang Pedoman, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016

1.2.5. PERATURAN DAERAH

- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Banjar;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;

- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah No. 5 Tahun 2016, tanggal 18 Agustus 2016)
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 yaitu :

- Memberikan arah bagi semua aparatur dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang lingkungan sehingga tujuan , sasaran program / kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat tercapai.
- Mempermudah pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup daerah baik internal maupun eksternal.
- Menunjukkan sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Banjar , khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Banjar dengan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar membuat Rencana Strategis adalah :

- Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
- Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabel.

Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program /kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategik (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 ini terdiri dari 7 Bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN, berisikan tentang Latar Belakang disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang berisi Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra KL dan Renstra Propinsi, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan isu – isu strategis.
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN, yang Tujuan Sasaran Jangka Menengah SKPD.
BAB V	:	STRATEGI DAN KEBIJAKAN, yang berisi Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN, yang Berisi Pengantar dan Rencana Program dan Kegiatan SKPD.
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2008 telah diterbitkannya Perda Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Sebagai keharusan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana perubahan organisasi dan tata kerja tersebut pelaksanaannya paling lambat pada akhir tahun 2008. Dan Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan perubahan struktur organisasi empat bidang dan satu sekretariat. Pada struktur ini Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah yang sebelumnya tergabung pada Dinas Perumahan dan Permukiman dipindah dan bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar.

Sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 2016 – 2021.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1.1. DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 pasal 6, Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (8) urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Tugas Pokok

Tugas Perangkat Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 pasal 12 (4) Dinas Lingkungan Hidup menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah B3.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 64 Tahun 2016 mempunyai fungsi :

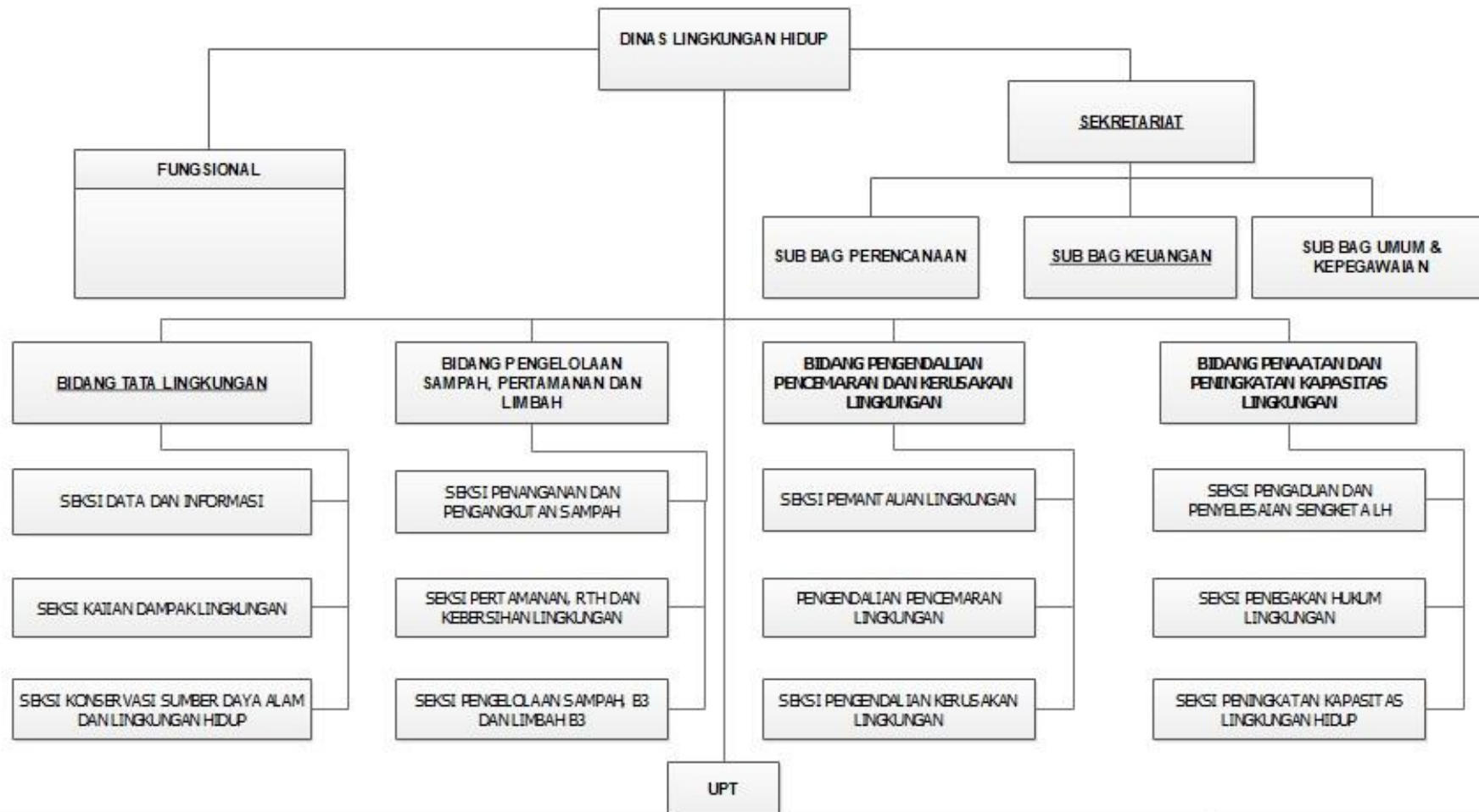
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan lingkungan ;
- c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan lingkungan hidup ;
- d. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam ;
- e. Pemberian pelayanan umum di bidang lingkungan hidup ;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- h. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan fungsional.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sesuai dengan pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 64 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Tata Lingkungan :
 - a. Seksi Data dan Informasi ;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan ;
 - c. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah, terdiri dari:
 - a. Seksi Penanganan dan Pengangkutan Sampah ;
 - b. Seksi Pertamanan, RTH dan Kebersihan Lingkungan
 - c. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
5. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI (PROSES, PROSEDUR, MEKANISME)



2.1.4. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- b. perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatandan peningkatan kapasitas lingkungan;
- c. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas
- d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
- e. pengawasan dan pengendalian bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- f. penanggung jawab seluruh kegiatan Dinas dan pencapaian sasaran kegiatan Dinas;

- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- i. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Dinas
- k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan keuangan, umum dan kepegawaian

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas ;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tata Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian kegiatan dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan teknis urusan data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah

Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- b. pengkoordinasian kegiatan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- d. penyelenggaraan teknis urusan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- d. penyelenggaraan teknis urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penaatandan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan teknis urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah pra syarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel, dan pengawasan yang efektif.

Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas, penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini di masa yang akan datang.

Terkait dengan hal tersebut diatas , jumlah aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada tahun 2017 berjumlah 84 orang PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 72 orang. Komposisi jabatan dan struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	0	0	0	1
2.	Sekretariat	0	1	2	6	9
3.	Bidang Tata Lingkungan	0	1	3	2	6
4.	Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah	0	1	3	50	54
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	0	1	3	2	6
6.	Pejabat Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	0	1	3	2	6
7	UPT Persampahan	0	0	1	1	2
	Jumlah	1	5	15	63	84

Berdasarkan data diatas, jenjang Eselonering menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing. Fungsi koordinasi dan kerjasama merupakan fungsi yang strategis yang dijalankan oleh 4 bidang dan sekretariat. Empat bidang menjalankan fungsi teknis dalam pemantauan kualitas lingkungan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan, inventarisasi data dan informasi lingkungan, penegakan hukum lingkungan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, pengelolaan persampahan, pertamanan dan limbah. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Selain tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki UPT Persampahan yang dipimpin oleh kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan kegiatan.

Kondisi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S.3	S.2	S.1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Dinas	0	1	0	0	0	0	1
2.	Sekretariat	0	2	2	5	0	0	9
3.	Bidang Tata Lingkungan	0	2	3	1	0	0	6
4.	Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah	0	2	3	20	21	8	54
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	3	2	0	0	0	6
6.	Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	0	4	2	0	0	0	6
7.	UPT Persampahan	0	0	1	0	0	1	2
Jumlah		1	14	13	26	21	9	84

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S.1	29 orang
2	D. III	7 orang
3	SMA	4 orang
4	Petugas Jaga Keamanan	4 orang
5	Penjaga Taman Kehati	2 orang
6	Bidang Kebersihan	27 orang
Jumlah		72 orang

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan dengan tingkat pendidikannya, berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas tingkat pendidikan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar yang berpendidikan S.1 sebanyak 13 orang dari jumlah Pegawai 84 orang, S.2 sebanyak 14 orang dan S.3 sebanyak 1 orang serta dibantu oleh tenaga tidak

tetap/kontrak sebanyak 72 orang. Tentunya ini menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai dinas yang membantu Bupati.

2.2.2. ASET / MODAL

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki setiap SKPD. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar mempunyai aset sejak berdirinya BAPEDALDA sebagaimana daftar berikut:

Tabel 2.4. Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Jumlah	Kondisi Barang
1	Alat Lab Umum (Hollow Cathode Lamp Hollowb Cathode Lamp Fe)	1	Baik
2	AC Split	39	22 Baik, 5 Kurang Baik
3	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1	Baik
4	Alat Bantu (Mesin Blower)	1	Baik
5	Alat Bantu (Mesin Dumping)	2	Baik
6	Alat Destilasi Utk mengekstrak sample padat	2	Baik
7	Alat Komunikasi Radio SSB	10	Baik
8	Alat Lab Hidro Kimia (Vacuum Fitratio System)	2	Baik
9	Alat Lab Umum (Hollow Cathode Lamp Hollowb Cathode Lamp Ca)	1	Baik
10	Alat Lab Umum (Hollow Cathode Lamp Hollowb Cathode Lamp Mg)	1	Baik
11	Alat Lab Umum (Hollow Cathode Lamp Hollowb Cathode Lamp Mn)	1	Baik
12	Alat Lab Umum (Hollow Cathode Lamp Hollowb Cathode Lamp Zn)	1	Baik
13	Alat Lab. Hidro Kimia (Alat Gls Elemenyer Uk 100 ml)	6	Baik
14	Alat Lab. Hidro Kimia (Alat Gls Elemenyer Uk 250 ml)	7	Baik
15	Alat Lab. Hidro Kimia (Alat Gls Elemenyer Uk 50 ml)	6	Baik
16	Alat Lab. Hidro Kimia (Alat Gls Elemenyer Uk 500 ml)	6	Baik
17	Alat Lab. Hidro Kimia (Lab Bottle Uk 100 ml)	6	Baik
18	Alat Lab. Hidro Kimia (Lab Bottle Uk 250 ml)	6	Baik
19	Alat Lab. Hidro Kimia (Lab Bottle Uk 50 ml)	6	Baik
20	Alat Lab. Hidro Kimia (Lab Bottle Uk 500 ml)	6	Baik
21	Alat Lab. Hidro Kimia (Prospenser Bottle Top Dispenser Volume 0,01-5 ml)	3	Baik
22	Alat Lab. Hidro Kimia (Prospenser Bottle Top Dispenser Volume 0,01-2,5 ml)	3	Baik
23	Alat Lab. Hidro Kimia (Sepektophoto meter portable)	1	Baik
24	Alat Lab. Hidro Kimia (TOC Analyzer/Portable)	1	Baik

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

25	Alat Lab. Kimia (Electrical Muffle Furnace)	1	Baik
26	Alat Lab. Kimia Air (Lemari Asam)	1	Baik
27	Alat Lab. kimia air (Penangas Air)	2	Baik
28	Alat Lab. Kimia Air (Portable Heavy Metal Analyzer)	1	Baik
29	Alat Laboratorium Umum (Pipette pump)	6	Baik
30	Alat Laboratorium Umum (Pipette pump)	26	Baik
31	Alat Laboratorium Umum (Pipette pump)	100	Baik
32	Alat Pemadam/Portable	3	Baik
33	Alat Pemadam/Portable	1	Baik
34	Alat Pencacah Hijauan	5	Baik
35	Alat Pencacah Hijauan (Mesin Pencacah Plastik)	1	Baik
36	Alat Perekam Suara	1	Baik
37	Alat Pengolahan Lahan, Komposter Padat	10	Baik
38	Alat Pengukur PH Tanah	5	Baik
39	Alat Potong Rumput	2	Baik
40	Alat Potong Rumput	2	Baik
41	Anemometer	1	Baik
42	Arit	5	Baik
43	Automatic Buret With Glass Stopcock & flat join bottle 10 ml	1	Baik
44	Beaker Glass	26	Baik
45	Beaker Glass	400	Baik
46	Bejana Ukur	1	Baik
47	Belanja Part, Injector GP dan Core Exavator	1	Baik
48	Belanja Part, Injector GP dan Core Exavator (Lain-lain Excavator)	1	Baik
49	Bibit Pohon Bintaro	48	Baik
50	Bibit Pohon Bintaro	20	Baik
51	Bibit Pohon Cabe Puya	180	Baik
52	Bibit Pohon Cabe Puya	35	Baik
53	Bibit Pohon Kecapi/Ketapi	3,300	Baik
54	Bibit Pohon Klengkeng	40	Baik
55	Bibit Pohon Langsung	90	Baik
56	Bibit Pohon Mahoni	90	Baik
57	Bibit Pohon Manggis	90	Baik
58	Bibit Pohon Petai	2,700	Baik

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

59	Bibit Pohon Pucuk Merah	92	Baik
60	Bibit Pohon Ramania	5,270	Baik
61	Bibit Pohon Rambai	3,300	Baik
62	Bibit Pohon Sirsak	362	Baik
63	Bibit Pohon Tanjung	90	Baik
64	Bibit Pohon Trembesi	25	Baik
65	Bibit Pohon Trembesi	90	Baik
66	Blender	1	Baik
67	Brankas	2	Baik
68	Brankas	1	Baik
69	Buku perundang- undangan	1	Baik
70	Camera + Attachmen	2	Baik
72	Camera Video	6	Baik
73	Cangkul	10	Baik
74	Centrifuge	1	Baik
75	CO Detector	1	Baik
76	Container	4	Baik
77	Container	4	Baik
78	CPU	1	Baik
79	Crucible 25 ml	10	Baik
80	Faxsimile	1	Baik
81	Faxsimile	1	Baik
82	Filling Besi/Metal	2	Baik
83	Filling Kabinet	3	Baik
84	Filling Kabinet	2	Baik
85	Filter Holder	2	Baik
86	Furnace	1	Baik
87	Gedung Tempat Kerja	1	Baik
88	Gelas Ukur	1	Baik
89	Gerobak Dorong	5	Baik
90	Global Postioning System	1	Baik
91	Global Postioning System (GPS)	9	Baik
92	Global Postioning System (GPS)	3	Baik
93	Global Postioning System (GPS)	1	Baik

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

94	Green House Sekolah	2	Baik
95	Handy Talky	2	Baik
97	Handycam	2	Baik
98	Handycam	1	Baik
99	Hardisk Eksternal	6	Baik
100	Hellige Turbidity Meter (Portable Turbidity Meter)	1	Baik
101	Hot Plate	1	Baik
102	Intalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan	2	Baik
103	Internet (Alat Wifi)	1	Baik
104	Internet (Alat Wifi)	1	Baik
107	Kamera CCTV	2	Baik
108	Kimia AAS	1	Baik
109	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
110	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
111	Kursi Kayu	7	Baik
112	Kursi Kerja Non Struktural	46	Baik
115	Kursi Kerja Non Struktural	46	Baik
116	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	31	Baik
117	Kursi Kerja Pejabat	25	Baik
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
119	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20	Baik
120	Kursi Rapat	80	Baik
121	Kursi Tamu	2	Baik
122	Lain-lain Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1	Baik
123	Lain-lain Alat Bantu (Mesin Blower)	1	Baik
124	Lain-lain Alat Bantu (Mesin Dumping)	2	Baik
125	Lain-lain Alat Kantor Lainnya (Tempat Sampah 50 liter + Trolley)	50	Baik
126	Lain-lain Alat Kantor Lainnya (Traffic Led)	50	Baik
127	Lain-lain Alat Kantor Lainnya (Trafficon)	50	Baik
128	Lain-lain Alat Komunikasi Radio SSB	10	Baik
129	Lain-lain Alat Lab Hidro Kimia (Volume Flask Vol 1000 ml)	10	Baik
130	Lain-lain Alat Lab Hidro Kimia (Volume Flask Vol 250 ml)	50	Baik
131	Lain-lain Alat Lab. Hidro Kimia (Volume Flask Vol 100 ml)	100	Baik
132	Lain-lain Alat Lab. Hidro Kimia (Volume Flask Vol 500 ml)	10	Baik

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

133	Lain-lain Alat Lab. Hidro Kimia (Volume Flask Volume 25 ml)	100	Baik
134	Lain-lain Alat Lab. Hidro Kimia (Volume Flask Volume 50 ml)	100	Baik
135	Lain-lain Alat Lab. Kimia (Centrifuge tube, conical bottom graduation with screw cap)	100	Baik
136	Lain-lain Alat Lab. Kimia (Electrical Muffle Furnace)	1	Baik
137	Lain-lain Alat Lab. Mikrobiologi (Petridish Volume 0,9 ml)	30	Baik
138	Lain-lain Alat Lab. Mikrobiologi (Petridish Volume 1.35 ml)	30	Baik
139	Lain-lain Alat Lab. Mikrobiologi (Petridish Volume 2.4 ml)	30	Baik
140	lain-lain Alat Lab. Umum (Erlemeyer)	300	Baik
141	lain-lain Alat Lab. Umum (Evaporation Basin)	40	Baik
142	Lain-lain Alat Lab. Umum (Funnel/Corong)	100	Baik
143	Lain-lain Alat Lab. Umum (Magnetik Retrieves For Magnetic stiring bar)	3	Baik
144	Lain-lain Alat Lab. Umum (Digital Thermohygrometer)	5	Baik
145	Lain-lain Alat Lab. Umum (Hygro Termometer Amarell)	5	Baik
146	Lain-lain Alat Laboratorium Mikrobiologi (Ose)	10	Baik
147	Lain-lain Alat Laboratorium Umum (Bola Hisap)	10	Baik
148	Lain-lain Alat Laboratorium Umum (Botol BOD)	20	Baik
149	Lain-lain Alat Laboratorium Umum (Bunsen)	3	Baik
150	Lain-lain Alat Laboratorium Umum (Eye Wash Bottle)	2	Baik
151	Lain-lain Alat Laboratorium Umum (Hot Hand Protector)	1	Baik
152	lain-lain Alat Laboratorium Umum (Penjepit tabung bahan kayu)	10	Baik
153	Lain-lain Alat Laboratorium Umum (The glascribe pen)	6	Baik
154	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Alat Komposting Cair)	20	Baik
155	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Alat Komposting Padat)	20	Baik
156	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Tempat Sampah)	36	Baik
157	Lain-lain Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya (Kontruksi Gedung Bukan Kantor)/Taman Kehati	1	Baik
158	Lain-lain Bangunan Gudang Untuk Bengkel (Gudang/Pengolahan Sampah)	1	Baik
159	Lain-lain Bangunan Pembuangan Air Kotor (Jaringan Sumur Resapan)	1	Baik
160	Lain-lain Bangunan Pembuangan Air Kotor (Jaringan Reservoir Biopori)	1	Baik
161	Lain-lain Bangunan Pembuangan Air Kotor (Jaringan Reservoir)	1	Baik
162	Lain-lain Bangunan Pembuangan Air Kotor (Jaringan Reservoir)	1	Baik
163	Lain-lain Bangunan Pembuangan Air Kotor (Reservoir dan Sumur Resapan)	35	Baik
164	Lain-lain Bangunan Pembuangan Air Kotor Jaringan Biopori	1	Baik

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

165	Lain-Lain Bangunan Pembuangan Air Kotor(Reservoir Biopori & Sumur Resapan)	15	Baik
166	Lain-lain Home Use (Kamera CCTV)	1	Baik
167	Lain-Lain Instalansi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) / Solar Cell	1	Baik
168	Lain-lain Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	Baik
169	Lain-lain Kendaraan Bermotor Beroda Toga	6	Baik
170	Lap Top	21	Baik
171	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis (Lemari Arsip)	4	Baik
172	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis (Lemari Rak)	6	Baik
182	Lemari Besi/Metal	2	Baik
183	Lemari Kaca	1	Baik
184	Lemari Kayu (Lemari Arsip)	1	Baik
185	Megaphone	1	Baik
186	Meja	2	Baik
187	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	79	Baik
188	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
189	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
190	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik
191	Meja Rapat	6	Baik
192	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
193	Mesin Absensi / Finger Print	1	Baik
194	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
195	Mesin Potong Rumput	2	Baik
196	Mesin Pencacah Sampah Organik	1	Baik
197	Microphone	2	Baik
198	Mobil Mini Bus	1	Baik
199	PC. Unit	12	Baik
200	Peralatan Jaringan SIMDA	1	Baik
201	PH Meter	1	Baik
202	Pick Up	2	Baik
203	Portable Generating Set	2	Baik
205	Portable Generating Set (Genset Portable Highlander)	1	Baik
206	Printer	20	Baik
207	Proyektor (LCD)	1	Baik
208	Rak Besi	4	Baik

209	Sepeda Motor	2	Baik
210	Sepeda Motor Scooter	5	Baik
211	Server (Website)	1	Baik
212	Tabung Centrifuge	10	Baik
213	Tabung Reaksi	420	Baik
214	Televisi	1	Baik
215	Tempat Sampah 50 liter + Trolley	50	Baik
216	Tempat Sampah 100 liter + Trolley	22	Baik
217	Tempat Sampah Standar	60	Baik
218	Tempat Sampah Terpilah 3 Warna	48	Baik
219	Traffic Led	50	Baik
220	Trafficcon	50	Baik
221	Truck + Attachment	12	11 Baik 1 Kurang Baik
222	Unit Power Supply (UPS)	11	Baik
223	UV/VIS Spectrophotometer	1	Baik
224	Water Current Meter	1	Baik
225	Water Test (Water Quality Meter Aquaplug with GPS (Multiparameter)	1	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, yaitu:

1. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup
2. Koordinasi kebijakan
3. Pengawasan terselenggaranya pengolahan data
4. Pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan
5. Monitoring dan evaluasi
6. Penaatan pengelolaan lingkungan dengan pelayanan pengaduan & penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum
7. Mengawasi terselenggaranya peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peduli dan berbudaya lingkungan
8. Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan

9. Mengawasi terselenggaranya kegiatan pengkajian kawasan dan pemanfaatan sumber daya alam
10. Mengolah sampah menjadi gas metan.

Bidang Tata Lingkungan bertanggungjawab atas terselenggaranya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi kegiatan inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup berupa penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), dokumen Neraca Kualitas Lingkungan Hidup (NKLH) dan Laporan Periodik Sampah dan penyusunan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL dan SPPL serta proses izin lingkungan. Selain itu bidang ini juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa pemeliharaan taman keanekaragaman hayati, penghijauan hutan ex-situ, in-situ dan cagar alam, reboisasi/penghijauan bantaran sungai, reboisasi/penghijauan hutan kota dan inventarisasi gas rumah kaca.

Bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan, serta penetapan petugas operasional kebersihan, mengatur jadwal pembuangan sampah dan pelaksanaan pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pemeliharaan sarana angkutan persampahan dan peralatan untuk operasional alat berat, roda enam, roda empat, roda tiga dan gerobak. Bidang ini juga bertanggungjawab atas penataan dan pemeliharaan RTH, Taman Kota serta lingkungan sekitarnya, perumusan kebijakan pengelolaan B3 dan Limbah B3.

Tabel 2.5. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2014

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional	RPPLH provinsi	RPPLH kabupaten/kota
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. pengelolaan limbah B3	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

			di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi	Penyelenggaraan pendidikan , Pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten /kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi 	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota 	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota
11	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah 	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

No	BIDANG	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tata Lingkungan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	Lokasi	-	-	1	1	1										
2		Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	Lokasi	-	-	48	60	70										
3		Jumlah Kawasan Kampung Hijau	Kampung	-	-	1	2	3										
4		Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	Dokumen	-	-	1	1	1										
5		Jumlah Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	Dokumen	-	-	120	130	140										
6		Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	Dokumen	-	-	3	3	3										
1	Pengelolaan Sampah, Pertamanan Dan Limbah	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	Lokasi	26	26	26	28	30										
2		Jumlah Penilaian Adipura	Kali	0	0	3	3	3										
3		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Paket	0	0	8	15	20										
4		Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Unit	0	0	61	75	85										

5		Jumlah Kelompok/Komunitas	Kelompok/Komunitas	0	0	20	30	40										
6		Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	Dokumen	0	0	1	1	1										
7		Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Orang	0	0	150	300	350										
8		Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	Pelaku Usaha	0	0	20	30	35										
1	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	Perusahaan	-	-	20	30	40										
2		Jumlah Perusahaan Yang telah di bina dan di nilai dalam peringkat Kinerja Perusahaan Kabupaten	Perusahaan	-	-	15	20	25										
3		Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Ijin Lingkungan	Pelaku Usaha	-	-	50	75	100										
4		Jumlah perusahaan yang memiliki sistem IPAL dan/atau yang telah memiliki IPLC	Perusahaan	-	-	20	30	40										
5		Jumlah Perusahaan Yang Menghasilkan Emisi Udara	Perusahaan	-	-	10	15	20										
6		Jumlah titik pantau air sungai	Titik Pantau	-	-	86	90	95										

7		Jumlah Titik pantau udara	Titik Pantau	-	-	8	10	12										
7		Jumlah dokumen mutu laboratorium	Dokumen	-	-	1	1	1										
8		Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen pengendali kebakaran hutan dan lahan	Komunitas	-	-	2	4	6										
9		Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	Dokumen	-	-	1	2	6										
10		Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	Perusahaan	-	-	10	20	30										
11		Jumlah Sistem Informasi Inventarisasi Pemetaan Kawasan Rawan Kerusakan Lingkungan yang terbentuk	Aplikasi	-	-	1	2	3										
1	Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Perusahaan	-	-	30	40	45										
2		Jumlah Peserta Sosialisas	Orang	-	-	200	250	300										
3		Jumlah Giat Operasi Gabungan Yustisi dan Non Yustisi	Kali	-	-	2	3	4										
4		Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Orang	-	-	200	250	300										
5		Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	Kasus	-	-	10	15	20										

6		Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	Kasus	-	-	10	15	20										
7		Jumlah pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	Sekolah	-	-	85	95	105										
8		Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	Sekolah	-	-	189	200	210										
9		Jumlah dokumen pendataan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	-	-	1	1	1										
1	BLUD Intan Hijau	Pot Tanaman	Pot	-	-	50	55	60										
2		Pupuk Kompos	Ton	-	-	12	12	13										
3		Pemilahan	Ton	-	-	1	1	2										
4		Sewa Toilet Mobil	Trip	-	-	12	14	16										
5		Sedot Tinja	Trip	-	-	24	28	32										
6		Jasa Layanan Kebersihan	Lembar	-	-	41.000	43.000	44.000										
7		Jasa Petugas Kebersihan	Event	-	-	24	34	35										
8		Tersedianya Sarana Prasarana di TPA	Unit	-	-	1	2	4										
9		Terlaksananya pemeliharaan dan operasional TPA	Bulan	-	-	12	12	12										

Tabel 2.6. Informasi Per Bidang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan				-	-	-	25%	35%										
	Persentasi Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan				-	-	-	15%	25%										
	Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar				-	-	-	35%	50%										

Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati					-	-	-	20%	28%										
Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri					-	-	-	20%	28%										
Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup					-	-	-	50%	53%										

Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan					-	-	-	70%	73%									
Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan					-	-	-	20%	40%									
Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata					-	-	-	20%	40%									
Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update					-	-	-	25%	28%									
Presentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan					-	-	-	80%	82%									
Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan					-	-	-	2%	4%									

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Jumlah Jenis Produk yang dihasilkan oleh BLUD Intan Hijau					-	-	-	7	8										
Persentase Pengurangan Sampah					-	-	-	20%	22%										
Persentase sampah yang dikelola di TPA					-	-	-	100%	100%										

Anggaran untuk alokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar bersumber dari Dana PAD/DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Peningkatan Alokasi anggaran masih cukup berbanding lurus dengan serapan anggarannya, meskipun masih ada permasalahan yang disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang dananya dilaksanakan pada bulan oktober, khususnya yang berkaitan dengan APBD-P sehingga keterbatasan waktu pada pelaksanaannya.

Kecermatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar sebagian besar sudah menerapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai dasar perhitungan dalam penyusunan/perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggung jawabkan.

Besarnya anggaran yang disediakan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	2,016	2,017	2,018	2,019	2,020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,784,862,000	2,033,246,907	1,679,048,750	2,318,236,020	2,781,883,224	1,742,928,533	1,930,202,292	1,645,943,227	-	-	98	95	98	-		0	(0)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,320,000	93,720,000	99,300,000	160,820,000	192,984,000	65,568,933	92,971,072	92,623,940	-		77	99	93	-		0	(0)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,000,000	11,184,000	13,187,000	15,000,000	18,000,000	14,987,500	11,184,000	13,187,000	-		100	100	100	-		0	(0)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	38,600,000	28,780,300	50,000,000	60,000,000	72,000,000	38,560,100	28,773,300	49,999,900	-		100	100	100	-		0	(0)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,012,000	18,265,000	8,847,000	10,000,000	12,000,000	8,492,000	17,265,000	8,725,000	-		85	95	99	-		0	(0)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,880,000	130,587,000	19,912,000	20,000,000	24,000,000	8,320,000	129,881,000	19,909,000	-		70	99	100	-		2	3
Penyediaan Makanan dan Minuman	276,600,000	394,060,000	324,362,750	330,000,000	396,000,000	272,750,000	329,225,000	318,980,000	-		99	84	98	-		0	(0)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	482,000,000	253,960,607	188,479,000	500,000,000	600,000,000	482,000,000	252,472,920	188,462,867	-		100	99	100	-		0	(0)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	865,450,000	1,097,650,000	974,961,000	1,222,416,020	1,466,899,224	852,250,000	1,063,390,000	954,055,520	-	-	98	97	98	-	0	(0)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	5,040,000	-	-	-	-	5,040,000	-	-	-	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	533,730,000	428,887,000	535,400,000	807,304,600	968,765,520	442,186,550	361,314,704	497,992,676	-	-	83	84	93		0	(0)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	52,000,000	-	-	50,000,000	60,000,000	43,267,000	-	-	-	-	83	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	18,640,000	74,000,000	438,000,000	525,600,000	-	18,550,000	73,609,088	-	-	#DIV/0!					
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	68,200,000	52,280,000	68,000,000	145,303,600	174,364,320	61,883,000	48,115,000	67,201,407	-	-	-	-	-		-	-
Pengadaan Mebeleur	51,000,000	-	-	-	-	46,471,500	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	121,162,000	157,720,000	147,400,000	30,000,000	36,000,000	120,292,000	156,457,000	139,253,000	-	-	99	99	94		2	(0)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	56,250,000	50,000,000	74,500,000	39,999,000	47,998,800	46,308,000	47,189,372	63,202,204	-	-	82	94	85		(0)	(0)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	155,150,000	127,907,000	153,500,000	84,002,000	100,802,400	104,830,050	86,925,332	146,796,977	-	-	68	-	-		-	(0)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	29,968,000	22,340,000	18,000,000	20,000,000	24,000,000	19,135,000	4,078,000	7,930,000	-	-						(0)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	26,125,000	-	19,800,000	23,760,000	-	26,125,000	-	-	-						

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	26,125,000	-	19,800,000	23,760,000	-	26,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170,000,000	188,570,000	-	75,000,000	90,000,000	165,598,200	183,226,189	-	-	-	97	97	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	170,000,000	188,570,000	-	75,000,000	90,000,000	165,598,200	183,226,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31,759,300	42,705,000	67,400,000	104,500,200	125,400,240	31,755,300	42,605,000	67,400,000	-	-	100	100	100	-	-	0	(0)	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31,759,300	42,705,000	67,400,000	77,400,000	92,880,000	31,755,300	42,605,000	67,400,000	-	-	100	100	100	-	-	#REF!	(0)	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	-	7,000,200	8,400,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	20,100,000	24,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan	649,560,000	13,105,519,690	12,219,377,470	-	-	583,321,779	12,683,876,916	11,153,817,071	-	-	90	97	91	-	-	#DIV/0!	5	
Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	-	10,650,000	34,489,300	-	-	-	10,650,000	33,269,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampahan	-	2,258,023,400	669,593,600	-	-	-	2,192,920,168	653,193,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	-	8,356,019,670	7,377,272,930	-	-	-	8,194,327,758	7,368,839,390	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	-	2,072,556,620	2,411,730,340	-	-	-	1,906,839,850	2,405,808,481	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Persampahan	196,950,000	122,760,000	-	-	-	176,779,779	110,705,300	-	-	-	90	#DIV/0!	-	-	#REF!	#DIV/0!
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	-	161,450,000	167,984,300	-	-	-	161,007,500	165,199,300	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	452,610,000	124,060,000	-	-	-	406,542,000	107,426,340	-	-	-	87	-	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	124,450,000	-	-	-	-	124,265,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Penugasan)	-	-	1,433,857,000	-	-	-	-	403,242,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,262,108,100	1,228,050,000	1,730,007,400	-	-	1,220,711,550	1,041,141,864	1,470,677,342	-	-	97	85	85	-	#DIV/0!	(0)
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	178,570,000	261,400,000	83,526,100	-	-	178,519,800	210,500,670	82,661,100	-	-	-	81	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Pemantauan Kualitas Lingkungan	559,728,100	391,140,000	365,750,000	-	-	555,985,350	290,148,792	258,673,456	-	99	74	71	-	-
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	-	-	183,249,500	-	-	-	-	175,900,000	-					
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	139,000,000	139,000,000	81,249,300	-	-	135,591,900	120,874,205	74,600,258	-	98	87	-	0	(0)
Pengkajian Dampak Lingkungan	112,060,000	163,760,000	157,733,500	-	-	106,658,800	156,431,600	147,943,830	-	95	96	94	-	-
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	-	-	103,000,000	-	-	-	-	95,220,276	-		#DIV/0!			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	-	-	241,800,000	-	-	-	-	195,734,631	-		#DIV/0!			
Pengkajian Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif	-	-	197,975,000	-	-	-	-	195,880,080	-		#DIV/0!			
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	272,750,000	272,750,000	315,724,000	-	-	243,955,700	263,186,597	244,063,711	-	-	96	77	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	1,278,450,000	-	-	-	-	1,092,073,330	-	-	-							
Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan	-	1,120,740,000	-	-	-	-	947,823,130	-	-	-							
Pembuatan Hutan Kota	-	157,710,000	-	-	-	-	144,250,200	-	-	-							
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	620,830,000	49,736,000	420,042,500	-	-	603,759,000	49,550,000	419,190,000	-	-	-	100	100				
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	49,736,000	76,000,000	-	-	-	49,550,000	75,500,000	-	-							
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	233,180,000	-	188,052,500	-	-	217,277,000	-	187,840,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	-	-	119,990,000	-	-	-	-	119,850,000	-	-							
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (Luncuran DBH-DR)	-	-	36,000,000	-	-	-	-	36,000,000	-	-							

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (DAK Reguler)	387,650,000	-	-	-	-	386,482,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1,096,851,500	1,124,072,800	846,529,800	-	-	1,053,007,229	1,089,217,601	761,740,644	-	-	96	97	90	-	0	(0)
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	727,862,500	769,540,000	523,920,000	-	-	697,746,100	757,338,950	488,432,122	-	-	96	98	93	-	0	(0)
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	368,989,000	354,532,800	322,609,800	-	-	355,261,129	331,878,651	273,308,522	-	-	96	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	152,600,000	173,010,000	285,656,800	-	-	142,834,900	163,185,592	186,924,986	-	-	94	94	65	-	#DIV/0!	(0)
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	-	-	103,000,000	-	-	-	-	92,399,184	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	152,600,000	173,010,000	182,656,800	-	-	142,834,900	163,185,592	94,525,802	-	-	94	94	52	-	0	(0)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	96,250,000	4,572,513,480	3,626,502,280	3,450,857,500	4,141,029,000	96,140,000	4,456,668,916	3,594,120,318	-	-	-	97	99	-	-	-
Penataan RTH	-	958,001,100	475,184,900	-	-	-	907,104,084	460,682,500	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan RTH	96,250,000	3,614,512,380	3,151,317,380	3,450,857,500	4,141,029,000	96,140,000	3,549,564,832	3,133,437,818	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau	-	-	225,000,000	-	-	-	-	224,562,219	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan BLUD	-	-	225,000,000	-	-	-	-	224,562,219	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	-	-	-	611,061,000	733,273,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klinik Pengendalian Pencemaran	-	-	-	100,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan & Penilaian Proper (Program Penilaian Prestasi Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan)	-	-	-	100,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	-	-	-	75,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	-	-	-	50,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri	-	-	-	50,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemantauan Kualitas Air	-	-	-	162,311,000	194,773,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemantauan Kualitas Udara	-	-	-	41,000,000	49,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Laboratorium	-	-	-	32,750,000	39,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	325,000,000	390,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	50,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Kajian Teknis Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Sda & Lingkungan	-	-	-	100,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendampingan Dan Pembinaan Implementasi Konsep Produksi Bersih	-	-	-	75,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Sistem Informasi Mitigasi Kerusakan Lingkungan	-	-	-	100,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penataan Sda, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	-	-	325,191,300	390,229,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penataan Taman Kehati	-	-	-	75,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghijauan Kawasan Perkotaan & Perdesaan (Gamis Hijau/ Urban Farming)	-	-	-	150,000,000	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Dan Pengembangan Kampung Hijau	-	-	-	45,791,300	54,949,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventarisasi Gas Rumah Kaca (Grk)	-	-	-	54,400,000	65,280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penegakan Hukum Lingkungan	-	-	-	540,249,500	648,299,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Pengawasan Penaatan Izin Lingkungan & Izin Pplh	-	-	-	102,559,500	123,071,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup	-	-	-	82,690,000	99,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operasi Gabungan Yustisi/Non Yustisi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	90,000,000	108,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	75,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	125,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	-	-	-	65,000,000	78,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan & Penaatan Di Bidang Lingkungan	-	-	-	524,801,200	629,761,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan	-	-	-	260,300,000	312,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan	-	-	-	189,000,000	226,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	75,501,200	90,601,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Sampah	-	-	-	9,697,273,700	11,636,728,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Kota Sehat/ Adipura	-	-	-	83,526,100	100,231,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	-	-	-	684,993,600	821,992,320	-	-	-	-								
Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	-	-	-	7,789,872,000	9,347,846,400	-	-	-	-								
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengurangan Sampah	-	-	-	139,750,000	167,700,000	-	-	-	-								
Penyusunan Kebijakan Pengurangan Sampah	-	-	-	34,488,000	41,385,600	-	-	-	-								
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	-	-	-	152,684,300	183,221,160	-	-	-	-								
Pengawasan Dan Pengendalian Teknis Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	-	-	-	81,248,700	97,498,440	-	-	-	-								
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah (DAK Penugasan)	-	-	-	730,711,000	876,853,200	-	-	-	-								
Program Pengelolaan Sampah (BLUD)	-	-	-	6,986,496,000	8,383,795,200	-	-	-	-								
Pengadaan Prasarana / Sarana Pengelolaan TPA	-	-	-	2,811,500,000	3,373,800,000	-	-	-	-								
Operasional Dan Pemeliharaan Pengelolaan TPA	-	-	-	4,174,996,000	5,009,995,200	-	-	-	-								
Program Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup	-	-	-	582,919,000	699,502,800	-	-	-	-								
Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup	-	-	-	131,369,000	157,642,800	-	-	-	-								

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Penyediaan Data Dan Pelaporan Lingkungan	-	-	-	451,550,000	541,860,000	-	-	-	-								
--	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DLH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan pengawasan, pengendalian, pencemaran dan pengelolaan dampak lingkungan serta penataan terhadap penegakan hukum lingkungan, pengawasan terhadap pengkajian kawasan sumber daya alam.

Pada 5 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2011-2015 yang masih menjadi tantangan diantaranya:

- a. Budaya masyarakat yang belum mendukung kebersihan dan lingkungan
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat pada perbaikan lingkungan
- c. Makin tingginya pencemaran perairan umum yang didominasi sampah
- d. Tingginya pencemaran polusi udara
- e. Masih tingginya kasus pencemaran lainnya

Sedangkan untuk peluangnya sebagai berikut:

- a. Undang – Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
- d. Peratiran Pemerintah No 74 Th. 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- f. Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan LH Akibat Pembakaran dan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- g. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah
- h. Adanya kesadaran masyarakat tentang lingkungan
- i. Terbukanya kesempatan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
- j. Tersedianya dana operasional yang bersumber dari APBD dan APBN

Secara umum budaya dan peluang yang terjadi pada 5 tahun sebelumnya tidak jauh berbeda pada 5 tahun yang akan datang, untuk mengatasi tantangan kedepan baik yang dari dalam maupun dari ancaman dari luar untuk menuju kondisi yang diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar memanfaatkan peluang yang ada, menselaraskan tantangan dan peluang tersebut dengan Renstra Kementerian LH. Di dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015-2019 sesuai dengan visinya yang merumuskan tujuan yaitu : memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian Nasional.

Tantangan dan peluang yang dihadapi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tantangan:

1. Semakin tumbuh dan berkembangnya hunian perumahan dan industri
2. Belum adanya tenaga fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar
3. Belum tercukupinya jumlah staf di sekretariat khususnya perencana dan masing – masing bidang
4. Adanya tenaga terlatih yang dimutasi keluar SKPD
5. Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban
6. Terbatasnya dana anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terakomodir di dalam proses penganggaran
7. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Persentase tersedianya luas RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota / kawasan perkotaan.

Peluang :

1. Tersedianya tenaga teknis yang terlatih dan kompetitif
2. Terbentuknya jabatan UPT untuk bidang laboratorium lingkungan dan persampahan
3. Tersedianya anggaran dana untuk pelatihan peningkatan SDM

4. Adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkesinambungan
6. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas yang jelas

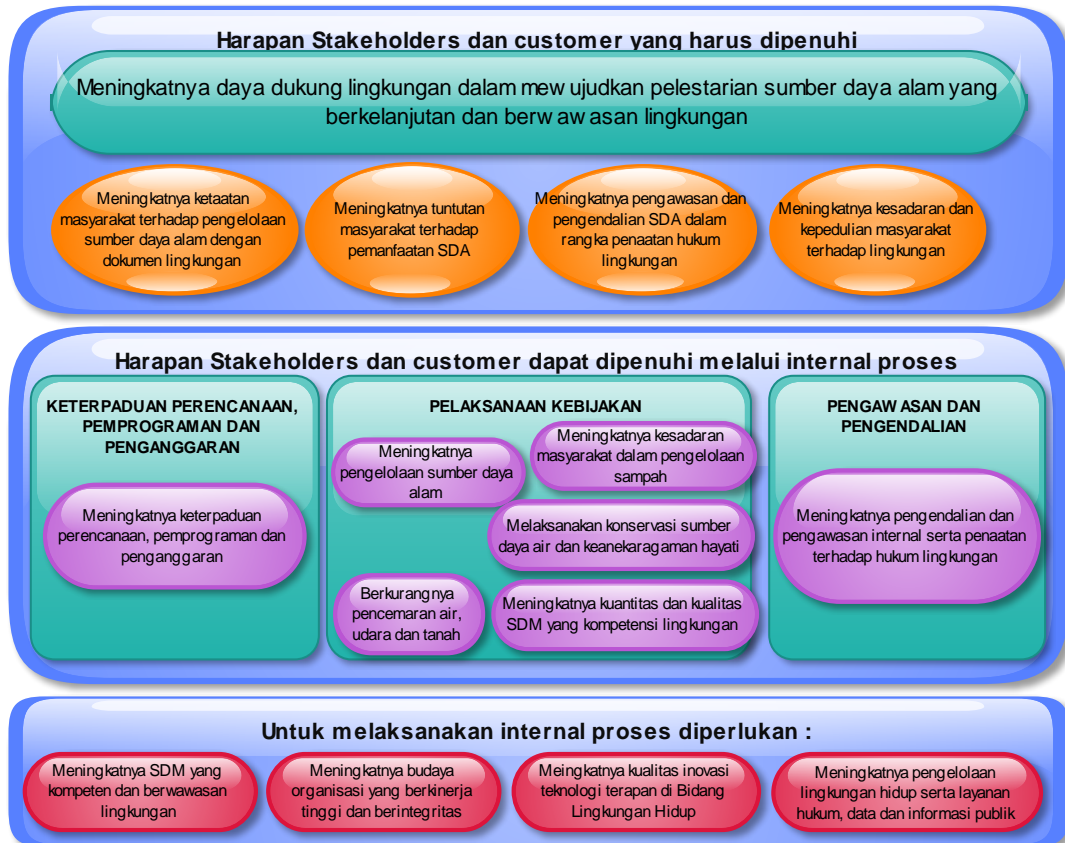
Meskipun budaya dan peluang yang terjadi pada 5 tahun belakangan masih belum begitu bagus, namun untuk 5 tahun yang akan datang tantangan – tantangan tersebut memberikan optimistis yang positif dengan bergabungnya Bidang Pengelolaan Sampah.

2.4.1. HASIL ANALISIS RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RENSTRA PROVINSI DAN RENSTRA K/L

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam (SDA)
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
4. Menurunnya atau berkurangnya pencemaran air, udara dan tanah
5. Melaksanakan konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompetensi lingkungan
7. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berwawasan lingkungan
8. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
9. Meningkatkan kualitas inovasi teknologi terapan di bidang lingkungan hidup
10. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta layanan hukum, data dan informasi publik
11. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan dokumen lingkungan

12. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian sumber daya alam dalam rangka penataan hukum lingkungan
13. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan



Gambar 2.1. Peta Strategis Kementerian Lingkungan Hidup

Dari sasaran tersebut, ditetapkan beberapa indikator pencapaian berikut target yang ingin diwujudkan. Pencapaian target ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel berikut menyajikan komparasi pencapaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar terhadap sasaran yang diamanatkan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan sasaran dalam Renstra Kabupaten Banjar. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa kombinasi keselarasan antara indikator dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan capaian Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan keselarasan dengan Renstra DLH Provinsi, yaitu dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7. Komparasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2016-2021 Terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Kementerian Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA DLHD PROV. KALSEL	CAPAIAN SASARAN DLH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (2015 – 2019)
1. Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan 2. Persentasi Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan		- Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan - Berkurangnya Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	- Menurunnya beban pencemar air dari industry yang dipantau dan diawasi - Menurunnya beban pencemar udara dari industry yang dipantau dan diawasi
3. Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar			
4. Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati 5. Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri		Tersedianya kawasan Taman Keanekaragaman Hayati	Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati
6. Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 7. Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan		- Terakomodirnya Pengaduan masyarakat & diselesaikan sumber – sumber masalah - Terselesaikannya konflik & sengketa LH	- Pengembangan system penataan dan penegakan hukum lingkungan - Penanganan Kasus Lingkungan - Peningkatan Edukasi dan komunikasi lingkungan
8. Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan 9. Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata		Terwujudnya kepedulian sekolah & tingginya apresiasi warga dalam pengelolaan LH (berbudaya lingkungan) dan tingginya sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	

10. Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update		Bertambahnya jumlah perusahaan dan atau pelaku usaha yang telah memiliki ijin lingkungan	- Peningkatan Sarana teknis Pengendalian dampak lingkungan - Meningkatnya mutu pelaksanaan AMDAL dan mutu dokumen AMDAL
11. Presentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan			
12. Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan		Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati
13. Jumlah Jenis Produk yang dihasilkan oleh BLUD Intan Hijau		Tersedianya Produk dan Jasa Pelayanan yang dihasilkan Oleh Blud Intan Hijau	- Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya - Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas
14. Persentase Pengurangan Sampah		Tercapainya Kota Sehat/Adipura serta Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	
15. Persentase sampah yang terkelola di TPA		Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional TPA	

2.4.2. HASIL ANALISIS RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RENSTRA RTRW KABUPATEN BANJAR

RTRW Kabupaten Banjar merupakan pedoman bagi kegiatan pembangunan fisik dan spesial wilayah Kabupaten Banjar. Dokumen RTRW merupakan rencana struktur ruang dan rencana pada ruang. Rencana struktur ruang sendiri memuat rencana sistem kata – kata dan rencana prasarana dasar wilayah sedangkan rencana pada ruang memuat rencana peruntukan ruang.

Terkait dengan permasalahan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam dokumen RTRW juga dilengkapi dengan ketentuan peraturan zonasi yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ketentuan peraturan zonasi sepatutnya dipatuhi oleh semua pelaku pembangunan dan juga pemerintahan sebagai pengawas pembangunan termasuk Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.8. Komparasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2016 – 2021 terhadap RTRW Kabupaten Banjar

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Th. 2016 - 2021	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan DLH Kab. Banjar	Arahan lokasi pengembangan pelayanan DLH Kab. Banjar
1	Rencana Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan persampahan - Mengadakan penyuluhan untuk masyarakat terhadap pengelolaan persampahan - Penyuluhan mengolah sampah organik menjadi kompos - Mendirikan bank – bank sampah, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan memilah sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan - Bank – bank sampah di Kab. Banjar - Terbentuknya Bank Sampah Induk - BLUD
		Air limbah <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Perusahaan yang telah memiliki pengolahan air limbah B3 - Prosentase perusahaan yang memiliki IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi terhadap masyarakat / perusahaan untuk mengolah air limbah B3 - Sosialisasi / monitoring perusahaan untuk memiliki/membuat IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya pengolahan air limbah B3 - Perlunya perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama pencemaran air secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Pertambangan

2.4.3. ANALISIS REALISASI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TERHADAP TARGET KLHS KABUPATEN BANJAR

Inti daripada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan dan lainnya. Hal ini sangat perlu agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara realisasi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar terhadap sasaran yang disajikan dalam KLHS.

Tabel 2.9. Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar terhadap KLHS Kab. Banjar

No.	Aspek Kajian terkait Tupoksi DLH	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan DLH Kab. Banjar	Catatan bagi perumusan program dan kebijakan
1	Pencemaran Air, udara dan tanah	<ul style="list-style-type: none">- Masih banyaknya sumber – sumber pencemaran di sungai sehingga berpengaruh pada beban pencemaran air seperti penggunaan jamban/MCK, sampah rumah tangga, industri pertambangan dan keramba- Masih banyak masyarakat tinggal di bantaran sungai- Meningkatnya kepadatan lalu lintas dan industri yang menghasilkan emisi gas buang- Masih banyak pengguna kendaraan melebihi masa pakai (5 tahun keatas)- Rusaknya struktur tanah diakibatkan oleh pertambangan dan kebakaran hutan dan lahan- Faktor lain pencemaran sungai Martapura diakibatkan oleh sumber pencemar air kabupaten lain	<ul style="list-style-type: none">- Berkurangnya sumber pencemar air yang melebihi baku mutu lingkungan- Timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah- Berkurangnya sumber pencemar air dan udara yang melebihi baku mutu	Pelunya melakukan peningkatan fasilitas infrastruktur pembangunan dan pengelolaan lingkungan di beberapa bidang
2	Alih Fungsi Lahan Bidang Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Banyaknya konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan (pertanian menjadi permukiman dan industri, perkebunan menjadi pertambangan)- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian dalam memberikan perizinan mendirikan bangunan- Belum terinventarisasi lahan-lahan produktif yang tidak dilindungi hukum- Belum adanya regulasi terhadap perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none">- Mengancam keseimbangan ekosistem- Meningkatnya luasan daerah rawan bencana- Menurunnya kualitas lingkungan	Pelunya melakukan peningkatan fasilitas infrastruktur pembangunan dan pengelolaan lingkungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, diperlukan identifikasi permasalahan yang ada atau akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Secara umum faktor-faktor internal yang mempengaruhi permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah Izin lingkungan, terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di bidang lingkungan, sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara, informasi dan edukasi masyarakat, kurangnya alokasi dana untuk program pembuatan taman dan biomassa, jumlah SDM pengawasan tidak sebanding dengan luasan wilayah, mutasi pegawai yang sudah terlatih dan kurangnya pejabat penyidik pada DLH Kab. Banjar.

Sedangkan faktor eksternal antara lain terbatasnya lembaga pelatihan yang khusus menangani lingkungan hidup, faktor musim yang menyebabkan tanaman kering dan memicu kebakaran, sulitnya lahan di wilayah perkotaan untuk penyediaan RTH, berkurangnya lahan untuk bervegetasi, kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dan kecenderungan budaya masyarakat pelaku pencemaran.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANJAR

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi di Dinas Lingkungan Hidup dalam fungsi pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Pengendalian	- Tersusun KLHS Kab. Banjar Tahun 2016 – 2021	Undang - undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Masih terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di Bidang Lingkungan	- Eksekutor pelaksanaan dokumen lingkungan	- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dibidang persampahan
	- Terlaksananya ketaatan perusahaan dan atau pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan melalui kepemilikan izin lingkungan	PP No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM	- Izin lingkungan yang diberikan karena telah tersusun dokumen lingkungannya	- Terbatasnya lembaga pelatihan yang khusus menangani lingkungan hidup	- Rendahnya tingkat edukasi pengelolaan persampahan di lingkungan masyarakat sekolah
	- Berkurangnya sumber pencemar air dan udara yang melebihi baku mutu lingkungan	Permen LH No 19 Tahun 2008 tentang SPM untuk daerah Provinsi dan Kab/Kota	- Minimnya Sosialisasi Pencegahan Pencemaran air dan udara		- Masih banyaknya aktivitas dari pelaku usaha atau perorangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan
Pemeliharaan	- Pembuatan Taman Kehati (Taman Keanekaragaman Hayati)		- Informasi dan edukasi masyarakat	Faktor musim yang menyebabkan tanaman kering dan memicu kebakaran	- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

	- Pengukuran Biomassa		- Kurangnya alokasi dana untuk program pembuatan Taman dan Biomassa	- Sulitnya lahan di wilayah perkotaan untuk penyediaan RTH	- Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya Ruang Terbuka Hijau
	- Penanaman Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH)		- Belum adanya SDM yang menangani biomassa	- Berkurangnya lahan untuk bervegetasi	
Pengawasan	- Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha		- Jumlah SDM pengawasan tidak sebanding dengan luasan wilayah	- Kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha	- Masih banyaknya pelanggaran pelaku usaha terhadap izin lingkungan
	- Pejabat Pengawasan LH		- Mutasi pegawai yang sudah terlatih ke SKPD lain	- Koordinasi dengan instansi terkait	- Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menyusun laporan/dokumen
	- Pemantauan Kualitas air dan udara		- Terbatasnya SDM dan sarana prasarana dalam pemantauan kualitas lingkungan	Kecenderungan budaya masyarakat pelaku pencemaran	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengubah budaya dalam melakukan pencemaran
Penegakan Hukum	- Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan atau kerusakan lingkungan		- Kurangnya pejabat penyidik pada DLH Kab. Banjar	Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam pengaduan masalah pelanggaran/pencemaran lingkungan	- Kurangnya penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pelanggaran pencemaran
	- Pemberlakuan sanksi administratif dalam batas kewenangan kelembagaan				- Belum optimalnya sosialisasi/ penyuluhan kepada pelaku usaha/ masyarakat terhadap pencemaran lingkungan

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Indeks Kualitas Air	Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurang optimalnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
			Kurang Optimalnya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Udara	Belum Optimalnya Perlindungan Pengelolaan LH & SDA	Kurangnya Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup
			Belum tertata sebagaimana mestinya SDA, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Pembinaan & Penaatan Lingkungan Hidup perlu dilakukan secara berkesinambungan	Perlu adanya penegakan hukum lingkungan
			Perlu adanya pembinaan & penataan di bidang lingkungan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 secara substansi tidak terlepas dari motto daerah, untuk mencerminkan tekad dan semangat yang tinggi dari masyarakat Kab. Banjar dalam ikut serta dan berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Daerah Banjar dengan tetap dilandasi iman dan taqwa, semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Implementasi dari filosofi pembangunan Kabupaten Banjar juga di terjemahkan dalam Visi Kabupaten Banjar yaitu "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah", dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai
2. Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 misi Kabupaten Banjar yang merupakan kelanjutan dari misi sebelumnya yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tupoksi SKPD tercantum dalam misi ke tiga yaitu :

“Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan”.

Tabel 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3			
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang persampahan	Terbatasnya sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sosialisasi persampahan	- Permasalahan sampah sudah menjadi Isu Nasional
		- Rendahnya tingkat edukasi pengelolaan persampahan di lingkungan masyarakat sekolah		- Telah diterimanya Penghargaan Adipura
				- Telah diterimanya Penghargaan Adiwiyata Kabupaten, Provinsi, Mandiri, Nasional dan Asean Eco School
2	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Inforasi SDA dan LH	- Belum optimalnya jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata di Kab. Banjar)	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	
		- Masih diperlukannya data dan informasi lingkungan hidup	Terbatasnya data dan informasi yang ada	Telah tersusunnya dokumen IKPLHD dan laporan periodik sampah
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan	- Kewajiban Kab/Kota untuk memenuhi luasan RTH sesuai UU No 6 tahun 2007
				- Komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hijau
4	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam	- Melaksanakan Konservasi Sumber Daya Alam

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Masih banyaknya aktivitas dari pelaku usaha atau perorangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan	- Kurangnya ketaatan pengelola SDA terhadap dokumen lingkungan yang sudah dibuat	- Mengikut sertakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
		- Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dalam penyusunan laporan		- Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penataan hukum lingkungan
		- Masih banyaknya dugaan kasus pencemaran lingkungan yang harus diselesaikan		
6	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	- Belum optimalnya sosialisasi/penyuluhan masalah pencemaran udara	- Ketidak sesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan	- Meningkatkan dana, sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN RENSTRA DLH KAB. BANJAR

Faktor-faktor penghambat ataupun fakto-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup apabila ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Renstra DLH Kab. Banjar

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan ketahanan air dan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya upaya dalam peningkatan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang melibatkan instansi terkait - Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang pemantauan kualitas lingkungan - Koordinasi antar SKPD tidak optimal - Terbatasnya dana - Rendahnya kompetensi SDM Aparatur - Kurang validnya data dan informasi pemantauan lingkungan yang tersedia - Lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelanggar/ perusak lingkungan hidup '- Tidak adanya PPNS khusus yang menangani lingkungan hidup - Kurangnya Aparatur Pengawas LH - Belum optimalnya pengawasan dalam pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat/pengusaha terutama yang tinggal di bantaran sungai - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat - Belum optimalnya pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang - Belum memadainya regulasi daerah berkaitan dengan pengelolaan lingkungan - Lemahnya pengetahuan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan '- Meningkatnya pembukaan lahan untuk kawasan pemukiman dan kegiatan pertambangan - Meningkatnya volume kendaraan bermotor sehingga menyebabkan meningkatnya polusi gas emisi udara - Kebiasaan masyarakat membakar lahan untuk membuka lahan persawahan dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari Kepala Daerah, DPRD dan Pemangku kepentingan (Stake Holders) - Tersedianya regulasi daerah berkaitan dengan pengelolaan lingkungan - Adanya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan - Tersedianya dana - Adanya pelatihan/diklat bagi aparatur, masyarakat dan pengusaha
2	Memanfaatkan potensi hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan lingkungan hidup sebagai penunjang perekonomian masyarakat - Terbatasnya dana - Kurangnya perhatian pemerintah dalam mendukung pemanfaatan hutan dan lingkungan hidup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan hutan dan LH 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat - Belum optimalnya pembinaan terhadap kader lingkungan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari Kepala Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan (Stake Holders) - Tersedianya dana - Dilaksanakannya sosialisasi
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelaksanaan program Keanekaragaman Hayati - Kurangnya koordinasi antar instansi terkait - Terbatasnya dana '- Terbatasnya Jenis keanekaragaman hayati - Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan program Keanekaragaman Hayati 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari Kepala Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan (Stake Holders) - Tersedianya dana - Terlaksananya koordinasi antar instansi '- Tersedianya regulasi di daerah

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Faktor-faktor penghambat ataupun fakto-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup apabila ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah terkait Fungsi dan Tugas DLH Kab. Banjar

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah yang mempengaruhi Lingkungan	- Belum adanya masterplan pengendalian dan pencemaran lingkungan - Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air ataupun udara.	- Belum terintegrasinya data dan informasi yang terkait dengan pencemaran lingkungan	- Sudah adanya regulasi tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup
2	Mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan gas rumah kaca	- Belum optimalnya pelaksanaan uji emisi - Kurangnya dana dan SDM yang berkompetensi	- Meningkatnya volume kendaraan bermotor - Masih banyaknya kendaraan bermotor yang beremisi tinggi	- Sudah terdapat peraturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara
3	Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (ijin lingkungan)	- Penggunaan sumberdaya alternatif yang kurang optimal. - Kurangnya koordinasi antarsektor dalam mengendalikan pencemaran air dan udara - Kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan hidup.	- Terdapat peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan - Tersedianya anggaran
4	Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut	- Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (ijin lingkungan)	- Masih rendahnya pengetahuan ataupun kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan lahan - Kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan hidup.	- Terdapat peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan - Tersedianya anggaran

Tabel 3.5. Telaahan Renstra KLHS Terkait Fungsi dan Tugas DLH Kab. Banjar

No	Muatan KLHS Kabupaten Banjar	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pencemaran air, Tanah dan udara	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tidak peduli lingkungan - Terbatasnya Dana - Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya - Terbatasnya sarana dan prasarana pengukuran kualitas udara 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya sumber-sumber penyemaran di sungai (penggunaan jamban/MCK, sampah rumah tangga, industri pertambangan (Minerba, keramba) - Meningkatnya kepadatan lalu lintas dan industri yang menghasilkan emisi gas buang - Masih banyak pengguna kendaraan melebihi masa pakai (5 tahun ke atas) - Rusaknya stuktur tanah di akibatkan oleh pertambangan dan kebakaran hutan dan lahan - Faktor lain pencemaran Sungai Martapura diakibatkan oleh dari sumber pencemar air Kabupaten tetangga (sungai riam kiwa - mengkaok) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah adanya regulasi tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup - Sudah terdapat peraturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara - Terdapat peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan - Tersedianya anggaran
2	Limbah cair dan padat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha dan masyarakat - Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan limbah cair dan padat - Kurangnya Aparatur Pengawas LH 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah cair dan padat - Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan limbah cair dan padat - Belum adanya regulasi kabupaten yang mengatur pengelolaan limbah cair dan padat 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari Kepala Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan (Stake Holders) - Tersedianya dana - Dilaksanakannya sosialisasi
3	Terbatasnya akses Informasi SDA dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya data dan informasi yang akurat - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah diterimanya anugerah Adipura dan Adiwiyata - Tersedianya data dan informasi lingkungan
4	Perubahan penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen Lingkungan (ijin Lingkungan) - Kurangnya Aparatur Pengawas LH 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan - Meningkatnya pembukaan lahan untuk kawasan pemukiman dan kegiatan pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari Kepala Daerah, DPRD dan Pemangku kepentingan (Stake Holders)

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Analisis strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis yang dapat di operasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peluang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Banjar adalah :

- Kondisi geografis Kabupaten Banjar yang sangat luas dan memiliki kekayaan SDA melimpah menjadikan sumber penghidupan bagi masyarakat.
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi pada peningkatan proses daur ulang sampah dan air limbah
- Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah (i) Kurangnya respon para pemangku kepentingan terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon); (ii) Dukungan Undang-undang untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan air limbah dengan menggunakan konsep dan sanitary landfill; (iii) Laju pencemaran / kerusakan lingkungan yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama di wilayah perkotaan Kabupaten Banjar akibat dinamika kegiatan rumah tangga, ekonomi, transportasi dan pembangunan; (iv) perlunya meningkatkan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumberdaya alam

secara bijaksana agar ketersediaan sumber air baik secara kualitas dan kuantitas dapat terjaga dan terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari tantangan tersebut menjadi landasan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk mempertimbangkan isu-isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
2. Kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan Sampah
3. Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Kehati
4. Pencemaran air sungai dan tanah oleh limbah cair dan padat
5. Pencemaran udara dari kegiatan industri, pertambangan dan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Rendahnya ketaatan perusahaan dan atau pelaku usaha terhadap hukum lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

A. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD jangka menengah yang mencerminkan pernyataan kondisi yang di inginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas yang harus diselesaikan selama kurun waktu lima tahun.

Untuk merealisasikan misi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- 2) Meningkatnya Kelayak Hunian

Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan utama untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan prima di Kabupaten Banjar.

B. Sasaran

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) yang mudah dipahami untuk dilaksanakan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun jangka menengah adalah :

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- 2) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Pemukiman Yang Nyaman

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					
				1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			69,70%	70,90%	72,10%	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	indeks kualitas air (IKA)			39.00%	41.00%	43.00%
				indeks kualitas udara			106.00%	108.00%	110.00%
				indeks kualitas tutupan lahan			65.64%	66.54%	67.46%
	Meningkatnya Kelayak Hunian lingkungan hidup dan sumber daya alam		Persentasi Pemukiman Layak Huni			70,49%	75,19%	79,00%	
			Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Pemukiman Yang Nyaman			48,26%	52,79%	56,56%	

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

5.1.1. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, dilakukanlah analisis strategis untuk mengidentifikasi secara sistematis upaya konkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Analisis strategis dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal (yang memuat faktor peluang dan tantangan).

5.1.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

- **Faktor Internal**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, yaitu :

1. Izin lingkungan yang diberikan karena telah tersusunnya dokumen lingkungannya
2. Informasi dan edukasi masyarakat
3. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
4. Masih terbatasnya kuantitas SDM yang berkompetensi khusus lingkungan, kesempatan pelatihan bagi Pegawai DLH.

- **Faktor Eksternal**

Faktor – faktor eksternal lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Ijin pelaksanaan kegiatan yang dimaksud
2. Eksekutor pelanggaran dokumen lingkungan
3. Terbatasnya lembaga pelatihan yang khusus menangani lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran - sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
3. Meningkatkan pembinaan dan penataan Lingkungan Hidup
4. Peningkatan pengelolaan persampahan
5. Peningkatan luas RTH

5.2. KEBIJAKAN

5.2.1. SISTEM KEBIJAKAN

Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau menetapkan suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem kebijakan, yang terdiri dari:

- 1) Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijaksanaan, yang

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan.

- 2) Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai "peranan tertentu" dalam sistem dan proses kebijaksanaan, sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
- 3) Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 4) Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan bersangkutan.

Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan yang akan dijadikan landasan dalam menentukan program dan kegiatan yaitu :

- 1) Meningkatkan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
- 2) Meningkatkan kualitas instrumen Lingkungan Hidup
- 3) Meningkatkan penegakan hukum lingkungan
- 4) Peningkatan upaya pengurangan volume sampah
- 5) Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan RTH publik

5.2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

Visi

Terwujudnya masyarakat Kab. Banjar yang sejahtera dan Barokah

Misi

1. MISI 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
2. MISI 4: Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing

Tabel T-C. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi III : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
			Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara
			Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup.
			Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Meningkatkan penanggulangan kerusakan lingkungan dan tutupan lahan
		Meningkatkan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Meningkatkan kualitas instrumen Lingkungan Hidup
			Meningkatkan pengembangan sitem informasi Lingkungan Hidup
			Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan tutupan lahan
			Meningkatkan perlindungan sumber daya alam
		Meningkatkan pembinaan dan penataan Lingkungan Hidup	Meningkatkan penegakan hukum lingkungan
			Meningkatkan pelayanan pengaduan pencemaran/ kerusakan lingkungan
			Meningkatkan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup
			Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat
			Meningkatkan pembinaan dan pemberian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

Misi IV : Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kelayak Hunian lingkungan hidup dan sumber daya alam			
	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan penyediaan RTH publik	Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan upaya pengurangan volume sampah
			Peningkatan upaya pengelolaan sampah terintegrasi
			Peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3
			Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana TPA
			Pengembangan bank sampah
		Peningkatan luas RTH	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan RTH publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PENGANTAR

Untuk mencapai rencana program kegiatan diperlukan indikator kegiatan pada kelompok sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan pendanaan yang diperlukan untuk membiayai Program Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini bidang Lingkungan Hidup Kab. Banjar sebagaimana akan diuraikan pada bab ini

6.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif akan di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					69,70%							Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar	
	3.11	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam		indeks kualitas air (IKA)					39,00%									
				indeks kualitas udara					106,00%									
				indeks kualitas tutupan lahan					65,64%									
	3.11		3.11.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Persentase Perusahaan Yang telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan 2. Persentase Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	0% 0%	-	0% 0%	-	25% 15%	611.061.000.00	35% 25%	1.654.000.000.00	45% 35%	2.068.000.000.00	45% 35%	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.26.1	Klinik Pengendalian Pencemaran	Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	20 Perusahaan	100.000.000.00	30 Perusahaan	200.000.000.00	40 Perusahaan	250.000.000.00	40	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.26.2	Pembinaan & Penilaian Proyer (Program Penilaian Prestasi Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan)	Jumlah Perusahaan Yang telah di bina dan di nilai dalam	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	15 Perusahaan	100.000.000.00	20 Perusahaan	200.000.000.00	25 Perusahaan	250.000.000.00	25	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.26.3	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	peringkat Kinerja Perusahaan Kabupaten	0 Pelaku Usaha	-	0 Pelaku Usaha	-	50 Pelaku Usaha	75.000.000.00	75 Pelaku Usaha	150.000.000.00	100 Pelaku Usaha	200.000.000.00	100	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.26.4	Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	20 Perusahaan	50.000.000.00	30 Perusahaan	130.000.000.00	40 Perusahaan	150.000.000.00	40	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.26.5	Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri	Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Ijin Lingkungan	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	10 Perusahaan	50.000.000.00	15 Perusahaan	130.000.000.00	20 Perusahaan	150.000.000.00	20	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.26.6	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah perusahaan yang memiliki sistem IPAL dan/atau yang telah memiliki IPLC	0 Titik Pantau	-	0 Titik Pantau	-	86 Titik Pantau	162.311.000.00	90 Titik Pantau	464.000.000.00	95 Titik Pantau	600.000.000.00	95	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.26.7	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Perusahaan Yang Menghasilkan Emisi Udara	0 Titik Pantau	-	0 Titik Pantau	-	8 Titik Pantau	41.000.000.00	10 Titik Pantau	180.000.000.00	12 Titik Pantau	200.000.000.00	12	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.26.8	Penyusunan Dokumen Laboratorium	Jumlah titik pantau air sungai	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	32.750.000.00	1 Dokumen	200.000.000.00	1 Dokumen	268.000.000.00	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.27	Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	0%	-	0%	-	35%	325.000.000.00	50%	650.000.000.00	60%	812.000.000.00	91%	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.27.1	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	0 Komunitas	-	0 Komunitas	-	2 Komunitas	50.000.000.00	4 Komunitas	125.000.000.00	6 Komunitas	150.000.000.00	6	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

3.11		3.11.27.2	Pembuatan Kajian Teknis Peren Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Sda & Lingkungan	pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000.00	2 Dokumen	200.000.000.00	3 Dokumen	300.000.000.00	6	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.27.3	Pendampingan Dan Pembinaan Implementasi Konsep Produksi Bersih	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	10 Perusahaan	75.000.000.00	20 Perusahaan	175.000.000.00	30 Perusahaan	200.000.000.00	30	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.27.4	Pembuatan Sistem Informasi Mitigasi Kerusakan Lingkungan	Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	0 Aplikasi	-	0 Aplikasi	-	1 Aplikasi	100.000.000.00	2 Aplikasi	150.000.000.00	3 Aplikasi	152.000.000.00	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.28	Program Penataan Sda, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1. Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejuk serta barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati 2. Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri	0% 0%	-	0% 0%	-	20% 20%	325.191.300.00	28% 28%	650.000.000.00	30% 30%	812.000.000.00	80 %	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.28.1	Penataan Taman Kehati	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	1 Lokasi	75.000.000.00	1 Lokasi	150.000.000.00	1 Lokasi	200.000.000.00	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.28.2	Penghijauan Kawasan Perkotaan & Pedesaan	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	48 Lokasi	150.000.000.00	60 Lokasi	330.000.000.00	70 Lokasi	432.000.000.00	70	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.28.3	(Gamis Hijau/ Urban Farming)	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	0 Kampung	-	0 Kampung	-	1 Kampung	45.791.300.00	2 Kampung	100.000.000.00	3 Kampung	110.000.000.00	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.28.4	Pembinaan Dan Pengembangan Kampung Hijau	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak CRK	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	54.400.000.00	1 Dokumen	70.000.000.00	1 Dokumen	70.000.000.00	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.29	Program Penegakan Hukum Lingkungan	1. Persentase Ketepatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup 2. Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	0% 0%	-	0% 0%	-	50% 70%	540.249.500.00	53% 73%	1.080.000.000.00	55% 75%	1.350.000.000.00		Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.29.1	Pengawasan Penataan Izin Lingkungan & Izin Pph	Jumlah Perusahaan yang diawasi	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	30 Perusahaan	102.559.500.00	40 Perusahaan	200.000.000.00	45 Perusahaan	250.000.000.00	45	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.29.2	Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Sosialisasi	0 Orang	-	0 Orang	-	200 Orang	82.690.000.00	250 Orang	150.000.000.00	300 Orang	200.000.000.00	300	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.29.3	Operasi Gabungan Yustisi/Non Yustisi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Diat Operasi Gabungan Yustisi dan Non Yustisi	0 Kali	-	0 Kali	-	2 Kali	90.000.000.00	3 Kali	180.000.000.00	4 Kali	250.000.000.00	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.29.4	Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	0 Orang	-	0 Orang	-	200 Orang	75.000.000.00	250 Orang	150.000.000.00	300 Orang	200.000.000.00	300	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.29.5	Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	0 Kasus	-	0 Kasus	-	10 Kasus	125.000.000.00	15 Kasus	250.000.000.00	20 Kasus	300.000.000.00	20	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.29.6	Facilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	0 Kasus	-	0 Kasus	-	10 Kasus	65.000.000.00	15 Kasus	150.000.000.00	20 Kasus	150.000.000.00	20	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.30	Program Pembinaan & Penataan Di Bidang Lingkungan	1. Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan 2. Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata	0% 0%	-	0% 0%	-	20% 20%	524.801.200.00	40% 40%	1.049.000.000.00	60% 60%	1.312.000.000.00	100 %	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.30.1	Pembinaan Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	85 Sekolah	280.300.000.00	95 Sekolah	500.000.000.00	105 Sekolah	700.000.000.00	105	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
3.11		3.11.30.2	Sosialisasi Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	189 Sekolah	189.000.000.00	200 Sekolah	399.000.000.00	210 Sekolah	450.000.000.00	210	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

	3.11		3.11.30.3	Pendataan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen pendataan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	75.501.200.00	1 Dokumen	150.000.000.00	1 Dokumen	152.000.000.00	3	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.34	Program Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup	1. Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update 2. Presentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan	0% 0%	-	0% 0%	-	25% 80%	581.918.000.00	28% 82%	665.000.000.00	30% 85%	832.000.000.00	90 %	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.34.1	Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	120 Dokumen	131.369.000.00	130 Dokumen	300.000.000.00	140 Dokumen	350.000.000.00	390	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	3.11		3.11.34.2	Penyediaan Data Dan Pelaporan Lingkungan	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	450.550.000.00	3 Dokumen	365.000.000.00	3 Dokumen	482.000.000.00	9	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
Meningkatnya Kelayak Hunian lingkungan hidup dan sumber daya alam	4.11																Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
				Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Pemukiman Yang Nyaman														
	4.11		4.11.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	0%	-	0%	-	2%	3.450.857.500.00	4%	6.677.000.000.00	5%	8.346.000.000.00	400	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	4.11		4.11.24.1	Pemeliharaan RTH	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	26 Lokasi	-	26 Lokasi	-	26 Lokasi	3.450.857.500.00	28 Lokasi	6.677.000.000.00	30 Lokasi	8.346.000.000.00	30	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	4.11		4.11.25	Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau	Jumlah Jenis Produk yang dihasilkan oleh BLUD Intan Hijau	0 Produk	-	0 Produk	-	7 Produk	450.500.000.00	8 Produk	650.500.000.00	9 Produk	750.500.000.00	87	BLUD INTAN HIJAU	Kab. Banjar
	4.11		4.11.25.1	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan BLUD	1 Pot Taneman	0 POT	-	0 POT	-	50 POT	450.500.000.00	55 POT	650.500.000.00	60 POT	750.500.000.00	165	BLUD INTAN HIJAU	Kab. Banjar
	4.11				2 Pupuk Kompos	0 TON	-	0 TON	-	12 TON		12 TON		13 TON		37	BLUD INTAN HIJAU	Kab. Banjar
	4.11				3 Pemilahan	0 TON	-	0 TON	-	1 TON		1 TON		2 TON		4	BLUD INTAN HIJAU	Kab. Banjar
	4.11				4 Sewa Toilet Mobil	0 TRIP	-	0 TRIP	-	12 TRIP		14 TRIP		16 TRIP		42	BLUD INTAN HIJAU	Kab. Banjar
	4.11				5 Sedot Tinja	0 TRIP	-	0 TRIP	-	24 TRIP		28 TRIP		32 TRIP		84	BLUD INTAN HIJAU	Kab. Banjar
	4.11				6 Jasa Layanan Kebersihan	0 LEMBAR	-	0 LEMBAR	-	41.000 LEMBAR		43.000 LEMBAR		44.000 LEMBAR		128000	BLUD INTAN HIJAU	Kab. Banjar
	4.11				7 Jasa Petugas Kebersihan	0 EVENT	-	0 EVENT	-	24 EVENT		34 EVENT		35 EVENT		93	BLUD INTAN HIJAU	Kab. Banjar
	4.11		4.11.32	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	0%	-	0%	-	20%	8.966.562.700.00	22%	16.000.000.000.00	24%	20.000.000.000.00		Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	4.11		4.11.32.1	Koordinasi Kota Sehat/ Adipura	Jumlah Penilaian Adipura	0 Kali	-	0 Kali	-	3 Kali	83.526.100.00	3 Kali	160.000.000.00	3 Kali	200.000.000.00	9	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	4.11		4.11.32.2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	0 Paket	-	0 Paket	-	8 Paket	684.993.600.00	15 Paket	2.000.000.000.00	20 Paket	3.000.000.000.00	20	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	4.11		4.11.32.3	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	0 Unit	-	0 Unit	-	61 Unit	7.789.872.000.00	75 Unit	13.080.000.000.00	85 Unit	15.670.000.000.00	85	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
	4.11		4.11.32.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengurangan Sampah	Jumlah Kelompok/Komunitas	0 Kelompok/Komunitas	-	0 Kelompok/Komunitas	-	20 Kelompok/Komunitas	139.750.000.00	30 Kelompok/Komunitas	250.000.000.00	40 Kelompok/Komunitas	400.000.000.00	40	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021

4.1.1	4.1.1.32.5	Penyusunan Kebijakan Pengurangan Sampah	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	34.488.000.00	0 Dokumen	60.000.000.00	1 Dokumen	80.000.000.00	2	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
4.1.1	4.1.1.32.6	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	0 Orang	-	0 Orang	-	150 Orang	152.684.300.00	300 Orang	300.000.000.00	350 Orang	400.000.000.00	350	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
4.1.1	4.1.1.32.7	Pengawasan Dan Pengendalian Teknis Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	0 Pelaku Usaha	-	0 Pelaku Usaha	-	20 Pelaku Usaha	81.248.700.00	30 Pelaku Usaha	150.000.000.00	35 Pelaku Usaha	250.000.000.00	35	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Banjar
4.1.1	4.1.1.33	Program Pengelolaan (BLUD)	Persentase sampah yang terkelola di TPA	0%	-	0%	-	100%	6.986.496.000.00	100%	15.906.000.000.00	100%	19.882.530.300.00		BLUD INTAN HAJAU	Kab. Banjar
4.1.1	4.1.1.33.3	TPA Cahaya Pengadaan Prasarana/ Sarana Pengelolaan TPA	Tersedianya Sarana dan Prasarana di TPA	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	2.811.500.000.00	2 Unit	7.906.000.000.00	4 Unit	10.000.000.000.00	7	BLUD INTAN HAJAU	Kab. Banjar
4.1.1	4.1.1.33.4	Operasional Dan Pemeliharaan Pengelolaan TPA	Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional TPA	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	4.174.996.000.00	12 Bulan	8.000.000.000.00	12 Bulan	9.882.530.300.00	36	BLUD INTAN HAJAU	Kab. Banjar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari misi RPJMD Kab Banjar dan berintegrasi pada tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan strategi kebijakan yang selanjutnya ditetapkan sejumlah Program prioritas yang dilaksanakan sesuai fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja serta ditetapkan pada indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan misi – misi RPJMD sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	Indeks Kualitas Air (IKA)	n/a	0	0	39.00%	41.00%	43.00%	
	Indeks Kualitas Udara	n/a	0	0	106.00%	108.00%	110.00%	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	n/a	0	0	65.64%	66.54%	67.46%	

Tabel 7.2 Penjelasan Tambahan Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula (Definisi Operasional)	Penjelasan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
							Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lingkungan	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Nilai SKM = Jumlah Nilai Ratarata tertimbang x 25 (nilai penimbang)	Th. 2015-2016 hanya 1 Kecamatan Th. 2017 9 kecamatan (380 kuesioner)	81.96	82.03	71.94	73.50	75.25	80.00	80.00
2		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	$\% \text{ Sungai} = \frac{\text{Sungai}}{\text{Total Sungai}} \times 100\%$ $\text{Skor} = \% \text{ Sungai} \times \text{bobot}$ $\text{Indeks Kualitas Air} = \sum \text{Skor}$	Terbagi ke cemaran ringan, sedang dan berat	45	30	33	36	39	42	42
			Indeks Kualitas Udara	$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - (50/0,9 \times (\text{leu} - 0,1))$		104,653	80	83	86	88	90	90
3		Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kehati	Persentase Peningkatan RTH	$\frac{\text{Luasan RTH di Perkotaan}}{\text{Luasan 50\% dari luas wilayah 20\% luasan RTH di luasan wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{105.036 \text{ m}^2}{6.707.000 \text{ m}^2} \times 100\%$	1,57%	1,58%	1,59%	1,60	1,61	1,63	1,63

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2016-2021 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra tersebut dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 disusun sebagai dasar tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan SKPD yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan

Demikian Rencana Strategik ini dibuat, agar dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti 2016-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut :

Tabel 8. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

MISI Pemerintah Kab. Banjar	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi ketiga MENINGKATKAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH LAINNYA DENGAN PENDEKATAN AGRIBISNIS DAN INDUSTRI BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lingkungan	Tingkat Kepuasan Pelayanan
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara
	Meningkatkan luasan RTH dan taman kehati	Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kehati	Persentase Peningkatan RTH